

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Lpmk Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang)

Nadia Augtaria Putri¹: Dr. Laila Kholid Al Firdaus, S.IP., M.P.P
nadiaaugtariap21@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses strategis untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan posisi tawar masyarakat dalam pembangunan. Salah satu instrumen pemberdayaan di tingkat kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menampung aspirasi, mendorong partisipasi, serta merencanakan dan mengawasi pembangunan secara partisipatif. Namun, implementasi peran dan fungsi LPMK di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, belum berjalan optimal akibat berbagai kendala kelembagaan dan koordinasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPMK dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Kidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Alfitri (2011) dengan metode kualitatif deskriptif (Creswell, 2007). Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi untuk menggali secara mendalam peran LPMK Lamper Kidul dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPMK Lamper Kidul dalam mendorong partisipasi masyarakat belum berjalan optimal pada seluruh tahapan pemberdayaan. LPMK cenderung berfungsi secara formal sebagai koordinator dan penyalur informasi, tanpa diimbangi keterlibatan aktif dalam penggalan aspirasi, perencanaan partisipatif, pelaksanaan inklusif, serta evaluasi yang sistematis. Lemahnya kapasitas internal, rendahnya transparansi, keterbatasan komunikasi, dan minimnya sosialisasi berdampak pada rendahnya partisipasi serta kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lamper Kidul lebih bersifat formalitas dan belum mampu menjawab kebutuhan riil warga.

Kata Kunci: LPMK Lamper Kidul, Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan

ABSTRACT

Community empowerment is a strategic process to increase the community's independence, participation, and bargaining position in development. One of the empowerment instruments at the village level is the Village Community Empowerment Institution (LPMK) which acts as a government partner in accommodating aspirations, encouraging participation, and planning and supervising development in a participatory manner. However, the implementation of the role and function of LPMK in Lamper Kidul Village, South Semarang District, Semarang City, has not been running optimally due to various institutional and coordination constraints. Therefore, this study aims to analyze the role of LPMK in encouraging community participation to increase empowerment in Lamper Kidul Village.

This study uses the institutional role of community empowerment as proposed by Alfitri (2011) with a descriptive qualitative method (Creswell, 2007). The research data was obtained through interview and observation techniques to explore in depth the role of LPMK Lamper Kidul in encouraging community participation.

The results of the study show that the role of LPMK Lamper Kidul in encouraging community participation has not run optimally at all stages of empowerment. LPMK tends to function formally as a coordinator and distributor of information, without being balanced with active involvement in aspiration exploration, participatory planning, inclusive implementation, and systematic evaluation. Weak internal capacity, low transparency, limited communication, and lack of socialization have an impact on low public participation and trust. This condition causes community empowerment in

Lamper Kidul Village to be more formalistic and has not been able to answer the real needs of residents.

Keywords: LPMK Lamper Kidul, Community Empowerment, Institutions

PENDAHULUAN

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Selain itu dikatakan pula bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan dan kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial (R. Hikmat, 2004). Dari pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa dalam pemberdayaan diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengamanan akses sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan, serta adanya partisipasi dalam arena politik masyarakat untuk memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Masyarakat yang mandiri berfungsi sebagai partisipan yang memiliki ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi kreatif, mengontrol lingkungan dan sumber daya mereka sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, serta terlibat dalam proses politik di tingkat negara. Dengan demikian, masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat perkotaan dapat dilakukan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK adalah mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Secara organisasi, LPMK berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan keberadaan LPMK, diharapkan kehidupan masyarakat dalam pembangunan dapat terfasilitasi, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menyeluruh (Sutoro, 2002).

LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk menjadi mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. LPMK berfungsi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,

mendorong gotong-royong, serta melaksanakan dan mengawasi pembangunan. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui; peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

LPMK menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa dihargai dan berperan langsung dalam menentukan arah perkembangan wilayah mereka. Strategi ini tidak hanya memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan jangka panjang, tetapi juga menghasilkan kemajuan fisik dan peningkatan kualitas hidup warga. Dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan antara LPMK, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat membawa kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan di tingkat kelurahan (Hasan, 2024).

Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, merupakan salah satu wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Semarang. Lurah Lamper Kidul menjelaskan bahwa kelurahan ini berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang mewakili pemerintah pusat. Dengan adanya LPMK yang mendukung kehidupan masyarakat dalam pembangunan, penting untuk menjalankan fungsinya agar kegiatan pembangunan dapat berjalan optimal. Saran dalam mengatasi kendala adalah pemberdayaan fungsi LPMK untuk menangani masalah internal dengan pemerintah daerah dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan LPMK. Kelurahan diharapkan segera mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait sarana dan prasarana LPMK, serta dana operasional yang telah dianggarkan. Anggota

LPMK diharapkan secara sukarela meluangkan waktu untuk membahas masalah yang ada dan fokus pada fungsinya agar kerja sama di antara anggota dapat terjalin dengan baik.

LPMK memiliki delapan fungsi utama di antaranya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan, serta mengawasi hasil pembangunan secara partisipatif, mengembangkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong-royong masyarakat, menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta menjaga keseimbangan lingkungan, memberdayakan dan melindungi hak politik masyarakat, dan menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Berdasarkan observasi, terdapat beberapa permasalahan di Kelurahan Lamper Kidul terkait upaya LPMK untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian warga kurang memiliki kesadaran diri karena masih menganggap pembangunan atau pemberdayaan hanya tugas pemerintah, sehingga inisiatif mandiri kurang tumbuh. Selain itu, karakteristik Lamper Kidul yang termasuk wilayah perkotaan membuat warga seringkali terlalu sibuk dengan aktivitas ekonomi masing-masing, sehingga sulit meluangkan waktu untuk pertemuan RT/RW atau kegiatan Kelurahan. Permasalahan lain yaitu kurangnya pemahaman warga mengenai cara menyusun usulan program pemberdayaan misalnya dalam Musrenbang atau Rembug Warga untuk kebutuhan nyata mereka. Kemudian, sarana dan prasarana LPMK juga kurang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemberdayaan lembaga agar dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelatihan masyarakat serta

meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan LPMK. Selain itu, Kelurahan diharapkan segera mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait sarana dan prasarana LPMK, serta dana operasional yang disediakan oleh pemerintah kota. Anggota LPMK juga diharapkan dapat meluangkan waktu untuk membahas masalah yang ada dan lebih fokus pada fungsinya, agar hubungan kerja sama di antara anggota dapat terjalin dengan baik

Dari uraian di atas, didapat masalah terkait bagaimana peran LPMK dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?. Hal ini sejalan untuk menganalisis peran LPMK Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis fenomena secara mendalam dan terperinci. Menurut Creswell (2007), metode kualitatif memungkinkan peneliti membedah permasalahan melalui analisis data teks maupun visual yang dibatasi oleh ruang dan waktu agar temuan lebih fokus dan terarah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, yang dipilih berdasarkan relevansi dinamika aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk memastikan informan memiliki karakteristik dan kompetensi yang relevan dengan topik kajian (Sugiyono, 2013). Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan, pengurus LPMK, pengurus PKK, serta tokoh masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan,

serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, literatur terkait, dan dokumentasi pendukung lainnya.

Teknik analisis data dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama. Proses dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, diikuti dengan reduksi data untuk menyaring, mengelompokkan, dan memfokuskan informasi yang benar-benar diperlukan. Data yang telah disaring kemudian disajikan secara naratif dan deskriptif, yang dapat didukung oleh tabel atau bagan untuk memperjelas pola temuan. Tahap akhir dari siklus ini adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi guna memastikan validitas hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian di Kelurahan Lamper Kidul menunjukkan bahwa proses identifikasi masalah dan perencanaan pembangunan melibatkan berbagai aktor kunci, namun dengan dinamika yang beragam. Maria Asumpta Widi Indriani selaku Kepala Seksi Pembangunan mengonfirmasi bahwa pemerintah kelurahan telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk mendukung kegiatan masyarakat, yakni sebesar Rp950 juta dari APBD dan APBN, dengan alokasi khusus bagi kelembagaan seperti LPMK sebesar Rp30 juta serta PKK dan Karang Taruna. Secara prosedural, Wawan Suroso menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan melalui mekanisme Rembug Warga yang kemudian berlanjut ke forum Musrenbang untuk menyelaraskan informasi dari pemerintah kota hingga ke tingkat RT/RW. Namun, di sisi lain, Bondan selaku pengurus LPMK mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, keterlibatan lembaga sering kali bersifat mendadak dan hanya sebatas formalitas dokumentasi tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai skema anggaran yang digunakan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan oleh LPMK Lamper Kidul lebih banyak terfokus pada aksi sosial yang bersifat

insidental. Bondan mencatat bahwa kegiatan yang paling menonjol adalah pemberian bantuan nasi bungkus untuk korban banjir rob di wilayah Semarang Utara, sementara program internal seperti camping ground untuk Karang Taruna yang direncanakan dengan anggaran Rp7-10 juta tidak diketahui realisasinya secara pasti oleh warga. Selain itu, terdapat temuan mengenai kondisi fisik kantor LPMK yang jarang beroperasi dan berdebu, yang mengindikasikan rendahnya aktivitas layanan harian bagi masyarakat. Data observasi melalui media sosial Instagram kelurahan juga memperkuat fakta minimnya dokumentasi kolaborasi aktif antara LPMK dan pemerintah kelurahan dalam program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Terkait aspek manajerial dan evaluasi, Farida selaku pengurus PKK menemukan adanya praktik kepemimpinan yang cenderung tertutup dan selektif dalam memilih pengurus, di mana sumber daya manusia yang berkualitas sering kali digantikan oleh individu yang lebih mudah dikendalikan. Hal ini sinkron dengan keterangan Wawan Suroso yang menyatakan bahwa kinerja organisasi cenderung bertumpu pada figur ketua semata, sementara pengurus lainnya memiliki keterbatasan kompetensi karena latar belakang pekerjaan non-formal. Terakhir, pada tahap evaluasi dan mitigasi, seluruh informan sepakat bahwa tidak pernah ada forum evaluasi sistematis yang melibatkan LPMK secara kolektif untuk membahas hambatan program yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa pola pemberdayaan yang dijalankan di Kelurahan Lamper Kidul masih terjebak pada tataran "partisipasi simbolik". Meskipun secara regulatif dan anggaran pemerintah telah memberikan ruang melalui alokasi dana yang jelas, namun ketiadaan transparansi dan komunikasi dua arah menyebabkan dana tersebut tidak terkonversi menjadi program yang memiliki dampak nyata bagi kemandirian warga. Lemahnya pemahaman pengurus LPMK mengenai detail anggaran menunjukkan bahwa

akses informasi masih terpusat pada elit birokrasi kelurahan, sehingga fungsi LPMK sebagai mitra strategis hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis administratif, bukan sebagai inisiator pembangunan berbasis kebutuhan akar rumput.

Kesenjangan antara idealisme teori pemberdayaan dan realitas di lapangan terlihat jelas pada jenis kegiatan yang dipilih. Fokus LPMK pada kegiatan bantuan sosial di luar wilayah (seperti bantuan banjir rob) menunjukkan bahwa lembaga ini lebih mengutamakan fungsi filantropi daripada fungsi pemberdayaan yang bersifat edukatif atau produktif bagi warga lokal Lamper Kidul. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam tahap identifikasi masalah, di mana aspirasi warga tidak terserap dengan baik sehingga program yang muncul bersifat repetitif dan tidak inovatif. Kantor LPMK yang tidak aktif secara operasional menjadi simbol fisik dari "matinya" kanal komunikasi antara warga dan lembaga, yang pada akhirnya memicu sikap apatis dari masyarakat urban yang cenderung individualis.

Lebih jauh lagi, permasalahan internal terkait nepotisme dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengurus menjadi hambatan struktural yang serius. Kepemimpinan yang tidak inklusif dan cenderung mempertahankan kendali kekuasaan menyebabkan hilangnya potensi inovasi dari kader-kader masyarakat yang kompeten. Tanpa adanya sistem evaluasi dan mitigasi yang sistematis, kegagalan program di satu periode akan terus berulang di periode berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan di Kelurahan Lamper Kidul memerlukan revitalisasi menyeluruh, mulai dari perbaikan tata kelola internal organisasi hingga penciptaan ruang dialog yang lebih transparan dan akuntabel antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat luas guna memastikan partisipasi yang tumbuh adalah partisipasi yang substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada Bab "Pemberdayaan LPMK Lamper Kidul dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, peran LPMK Lamper Kidul dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Tahap identifikasi awal menunjukkan bahwa LPMK lebih banyak berfungsi sebagai koordinator formal melalui forum RT/RW dan kelurahan, sedangkan keterlibatan langsung dalam penggalian aspirasi serta kebutuhan masyarakat masih terbatas. Peran LPMK lebih menekankan pada penyaluran informasi ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dibandingkan menghadirkan ruang partisipasi yang inklusif di tingkat lokal. Tahap perencanaan cenderung bersifat seremonial dengan keterlibatan LPMK yang terbatas. Mekanisme perencanaan, pembagian dana, dan penggunaan anggaran tidak disampaikan secara transparan, sehingga memperlebar jarak antara prinsip partisipatif dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Aksesibilitas lembaga yang rendah serta keluhan internal pengurus semakin menegaskan lemahnya fungsi LPMK sebagai wadah aspirasi masyarakat yang terbuka dan dapat dipercaya.

Tahap pelaksanaan menunjukkan adanya kendala komunikasi internal, keterbatasan sosialisasi, dan eksklusivitas kegiatan yang hanya melibatkan kelompok tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakjelasan peran LPMK dalam penanganan persoalan sosial, serta terbentuknya persepsi bahwa program pemberdayaan lebih menekankan formalitas dibandingkan pemenuhan kebutuhan nyata warga.

Tahap evaluasi, mitigasi, dan pengendalian tidak dilaksanakan secara sistematis oleh LPMK Lamper Kidul. Ketiadaan forum komunikasi dan instrumen evaluasi menyebabkan lemahnya upaya mitigasi serta tidak adanya mekanisme pengendalian yang dapat menjamin keberlanjutan program. Situasi ini memperlebar jarak antara LPMK

dengan masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa keberadaan lembaga tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah warga.

Keseluruhan temuan menegaskan bahwa LPMK Lamper Kidul belum mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hambatan utama meliputi lemahnya kapasitas internal, ketidaktransparanan mekanisme perencanaan, keterbatasan komunikasi, minimnya sosialisasi, serta absennya evaluasi sistematis. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lamper Kidul pada akhirnya cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.

SARAN

Upaya optimalisasi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lamper Kidul ke depan memerlukan transformasi pendekatan yang lebih proaktif, transparan, dan partisipatif. Sebagai mitra strategis pemerintah, LPMK diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak utama dalam membangkitkan kembali semangat swadaya dan gotong royong di tengah masyarakat urban. Penguatan identitas lembaga ini sangat penting agar masyarakat melihat LPMK sebagai wadah yang inklusif dan representatif terhadap kebutuhan mereka, bukan sekadar perpanjangan tangan birokrasi.

Untuk mengatasi persoalan perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung bersifat seremonial dan terjebak dalam pola top-down, diperlukan intervensi kebijakan dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Fasilitasi berupa pelatihan teknis bagi pengurus LPMK menjadi hal yang mendesak, terutama yang berkaitan dengan metodologi pemetaan potensi wilayah, teknik perencanaan pembangunan partisipatif, serta analisis kebutuhan masyarakat secara akurat. Dengan peningkatan kapasitas manajerial ini, LPMK akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam merumuskan agenda pembangunan

yang substantif dan berorientasi pada pemecahan masalah riil di tingkat akar rumput.

Pada ranah implementasi, strategi pemberdayaan harus digeser menjadi lebih berbasis pada kebutuhan nyata warga melalui keterlibatan langsung dalam setiap proses pemetaan masalah. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal akan meminimalisir risiko kegagalan program yang hanya bersifat formalitas dan memastikan bahwa output pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya secara luas. Selain itu, penting untuk mulai memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital, guna meningkatkan transparansi informasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran program kepada publik.

Terakhir, siklus pemberdayaan masyarakat di Lamper Kidul harus ditutup dengan mekanisme evaluasi partisipatif yang sistematis. LPMK hendaknya melembagakan ruang-ruang diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) atau penyebaran survei kepuasan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik yang jujur dari masyarakat. Hasil evaluasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi dan bahan perbaikan bagi perencanaan program di periode selanjutnya, sehingga tercipta pola pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa relevan dengan dinamika sosial masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmat, R. H. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humanira Utama Press .
- Sunyoto. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro, E. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, J. W. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. California: SAGE.